

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Operasional Penggunaan senjata api ada yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ada juga yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelaksanaan penggunaan senjata api yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu :

- a. Anggota TNI telah mendaftarkan senjata api yang diperuntukkan kepada mereka agar senjata api tersebut resmi untuk digunakan.
- b. Anggota TNI telah melakukan pemeliharaan senjata api yang berada di gudang senjata agar senjata api tersebut siap digunakan dan terhindar dari kerusakan serta penurunan kualitas.

Namun demikian, masih adanya jual beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI dan penggunaan yang menyimpang dari pedoman yaitu penembakan terhadap rakyat yang harusnya dilindungi

2. Sanksi hukum yang diberikan kepada anggota TNI apabila terjadi penyalahgunaan senjata api.

a. Sanksi administrasi

sanksi administrasi bisa berupa penundaan mengikuti pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama dua sampai empat periode, hingga pemberhentian tidak hormat dari satuan TNI

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana berupa kurungan paling lama sepuluh hari dan denda paling banyak lima puluh rupiah berdasarkan pasal 500 KUHP, sanksi pidana berupa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 pasal 1 ayat (1), sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sementara waktu maksimum dua puluh tahun berdasarkan pasal 137 ayat (1) KUHPM.

**B. Saran**

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis memiliki saran yang diharapkan dapat berguna bagi satuan Tentara Nasional Indonesia yaitu agar pengawasan dalam penggunaan senjata api dari seluruh anggota TNI semakin diperketat dan peningkatan pengecekan kejiwaan dari seluruh anggota TNI secara berkala agar penyalahgunaan senjata api dalam lingkup TNI bisa berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

-----, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Peraturan Kasad Nomor 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Idelijke Bijzondere Strafbepalingen*.

### 3. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara Nasional Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Tentara Nasional Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentara_Nasional_Indonesia)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)

<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang>

<https://danielldt.wordpress.com/2011/11/09/prosedur-teknis-kepemilikan-senjata-api/>

<https://nofryhardi.comwordpress.com/2016/10/19/peraturan-senjata-api-dalam-uu-no-12-tahun-1951/>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2017-7.pdf>